

NOTULEN

TEMU KOORDINASI DAN IDENTIFIKASI PROGRAM PERBAIKAN PERIKANAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

Hotel Alana - Surabaya, 25 Januari 2023

A. PEMBUKAAN

1. Acara Pembukaan dimulai dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya
2. Acara dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan – Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI: Dr Ir Ridwan Mulyana, MT, dengan penekanan pada :
 - Pengelolaan perikanan sesuai amanah Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 1 Angka 55 bahwa untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, maka pengelolaan perikanan tersebut dilakukan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Permen KP Nomor 18/PERMEN-KP/2014).
 - Setiap WPPNRI mempunyai perbedaan karakteristik ekosistem perikanan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya terkait pemanfaatan sumber daya ikan di setiap WPPNRI. Perbedaan karakteristik tersebut antara lain yaitu *multi-species, multi-gear, multi-habitat, dan multi-stakeholder*. Perbedaan karakteristik tersebut juga berkaitan dengan potensi sumber daya ikan yang ada di masing-masing WPPNRI. Potensi ikan di masing-masing daerah sangat beragam krn potensi mangrove, terumbu karang dan lamun yang dimiliki.
 - Program Perbaikan Perikanan atau *Fisheries Improvement Program (FIP)* merupakan sebuah upaya dalam mendukung percepatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan dan merupakan program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini juga merupakan upaya meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur agar dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.
 - Program utama KKP adalah perluasan Kawasan konservasi menjadi 30% dari total wilayah laut, selain itu program terkait lingkungan terkait penanganan sampah, bulan cinta laut. Dibutuhkan keseimbangan antara kolaborasi program antara aspek lingkungan , sosial dan ekonomi secara berkesinambungan.
 - Lemuru sudah memiliki RPP Lemuru melalui Kepmen KP 68/KEPMEN KP/2016 dan saat ini sedang dilaksanakan Finalisasi RPP Lemuru pada tahun ini (prosusi KKP 2023). Lemuru telah diidentifikasi terdapat di beberapa tempat yaitu di Selat Bali, Selat Madura, Prigi, Grajagan, Kupang, dan Manado.

- Rajungan sudah memiliki RPP Rajungan yang terbaru melalui Kepmen KP No. 83 Tahun 2022 dan telah memiliki Harvest Strategy Rajungan di WPPNRI 712 melalui Keputusan Dirjen PT No 6/KEP-DJPT/2020.
- Tuna Cakalang Tongkol TCT sudah memiliki RPP TCT melalui Kepmen KP 121 tahun 2021 dan saat ini sedang proses inisiasi penyusunan Harvest Strategy nya.
- Kakap/Kerapu sudah memiliki RPP Kakap/Kerapu melalui Kepmen KP nomor 123 Tahun 2021 dan saat ini sedang finalisasi HS kakap dan HS Kerapu di WPPNRI 713 dan Inisiasi penyusunan di WPPNRI 573.
- Penanganan ikan hasil tangkapan wajib segera dilakukan utk menghasilkan nilai yang tinggi. Hal ini dibutuhkan fasilitas Pelabuhan dan sarana prasarana yang mendukung aktifitas tersebut. Semua dilakukan scr cepat dan terintegrasi.
- Program penangkapan ikan terukur. Penangkapan ikan yang terkendali di area yang ditentukan berdasarkan kuota yang ada. Pada awalnya kegiatan penangkapan ikan dilakukan berdasarkan perijinan yang dikeluarkan di awal kegiatan.
- Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali, dilakukan di area yang telah ditentukan, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, memberikan kesempatan berusaha, kepastian investasi, memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan;
- Pemerintah menyiapkan kebijakan penangkapan ikan terukur sebagai upaya untuk memperbaiki pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya melalui pengaturan zona penangkapan ikan terukur dan kuota penangkapan ikan.
- Salah satu perubahan yang mendasar dalam penangkapan ikan terukur yaitu perubahan mekanisme dari *input control* menjadi *output control*. Perubahan tersebut perlu dilakukan karena mekanisme *input control* belum dapat digunakan untuk pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal. Adapun dengan mekanisme *output control*, pelaku usaha diberikan batasan kuota penangkapan ikan, sehingga pemanfaatan sumber daya ikan dapat lebih terkendali.
- Kebijakan penangkapan ikan terukur dilakukan dengan pendekatan zona penangkapan ikan terukur. Zona penangkapan ikan terukur tersebut mencakup wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas, yang dibagi menjadi 6 (enam) zona penangkapan ikan terukur. Dalam rangka pemerataan ekonomi khususnya di daerah penghasil sumber daya ikan, kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan diwajibkan melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan pada zona penangkapan ikan terukur sesuai dengan daerah penangkapan ikannya. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan adanya

- peningkatan aktivitas ekonomi di daerah penghasil sumber daya ikan sekaligus membuka lapangan kerja.
3. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur bapak Alan Wahyu Putra, S.STP., MM yang sekaligus membuka dengan resmi acara temu koordinasi, dalam arahan tersebut beliau menekankan pada :
 - Program kegiatan MSC sudah linier dengan RPJMD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
 - Jawa Timur sebagai penyumbang Produksi nomor satu dengan volume produksi 598 ton dan sebagai ekspor terbanyak dengan komoditas udang dan Tuna;
 - Harapan untuk program perbaikan perikanan kedepannya adalah adanya ikan ekonomis penting lainnya seperti kerang kerangan, kakap, kerapu, layur dan lainnya.
 4. Paparan berikutnya adalah oleh pihak MSC yang diwakili oleh bapak Hirmen Syofyanto dengan topik dukungan percepatan pengelolaan perikanan tangkap produk hasil perikanan berkelanjutan di Indonesia
 5. Paparan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan topik : Dukungan dan Arah Kebijakan Program Perbaikan Perikanan Di Provinsi Jawa Timur disampaikan oleh Subkoordinator Pengelolaan sumber daya ikan ibu Ir. Wahjuni Lestariningsih
 6. Pada kesempatan ini terdapat 3 peserta yang mengajukan pertanyaan atau masukan yaitu :
 - Patrick dari PT. Sumber Daya Samudera : mengetahui Kerjasama antara pihak swasta dan Instansi. Proses Kerjasama dari pihak swasta sesuai mekanisme MSC dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
 - Suhadi-P3KP : program MSC masih pada beberapa komoditi. Apakah sertifikasi itu digunakan untuk kawasannya. Karena produk2 perikanan sangat beragam.

7. Penyampaian Materi

Narasumber	Pak Hirmen Syofyanto, M.Sc
Judul Materi	Dukungan Percepatan Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Produk Hasil Perikanan Berkelanjutan di Indonesia
Substansi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengenalan program b. Komitmen Global c. Standar Perikanan d. Rantai Perikanan e. Proses Sertifikasi MSC f. Keterlibatan Instansi, Akademisi dan stake holder lainnya g. Fisheries Improvement program h. Ruang Lingkup RKT dan Rencana Kegiatan 2023
Narasumber	Ir. Wahjuni Lestarningsih
Judul Materi	Dukungan dan Arahan Kebijakan Perbaikan Perikanan di Jawa Timur
Substansi	<ol style="list-style-type: none"> a. Profile Kelautan dan Perikanan Jawa Timur b. Aturan Hukum c. Kebijakan pengelolaan Perikanan di Jawa Timur d. Pendataan perikanan tangkap e. Penguatan SDM dan kelembagaan f. Optimalisasi pengawasan g. Fasilitas Pelabuhan Perikanan
Narasumber	(Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan)
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi terbesar Rajungan • Daerah penghasil rajungan Kel. Pejagan, Pangeranan • Jaring rajungan, bubu rajungan • Data produksi selama 3 tahun ini menurun dikarenakan penurunan permintaan dari agen Tahun 2020 : 3,981 ton, Tahun 2021: 3,965 dan tahun 2022 3920 ton • Banyaknya nelayan trawl yang melakukan aktifitas penangkapan • Masa Panen April-Agustus, ekosistem mangrove banyak alih fungsi • Harga rajungan anjlok • Tindak lanjut : pengelolaan rajungan diperlukan upaya rehabilitasi ekosistem terutama mangrove, perlunya campur tangan dari pemerintah terkait penentuan harga, perbaikan ekosistem serta bantuan sarana dan prasarana Rajungan

Narasumber	(Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan)
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2021 rumah ikan, harapan tahun berikutnya akan dilakukan kegiatan serupa. • Tahun 2022 underwater restocking • Potensi ikan : teri nasi, banyar, kembung, tongkol, semar, kurisi, rajungan. Untuk harga rajungan relatif lebih tinggi daripada jenis ikan lainnya. • Edukasi kepada masyarakat terkait bantuan alat tangkap ramah lingkungan, untuk nelayan rajungan dengan bubu lipat, • Ekosistem mangrove terjadi penyempitan luasan karena alih fungsi untuk tambak dll.
Narasumber	(Dinas Perikanan Kabupaten Malang)
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Arah Pembangunan Perikanan (prinsip keberlanjutan, orientasi kelestarian sumberdaya dan lingkungan, Kerjasama terpadu) • Potensi perikanan dan kelautan Kab. Malang • Potensi Masalah di Kab. Malang : TDKP, penanganan pasca penangkapan ikan (ukuran yang ditangkap besar sedangkan armadanya kecil)
Narasumber	(Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan)
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Komoditi ekonomis penting : teri nasi, rajungan, ikan kembung (medai) (sentra rajungan di lekok dan nguling) • Kegiatan MSC yang akan mendukung keberlanjutan: perlindungan berbasis Kawasan, pengawasan penggunaan alat tangkap, MPA, • Intervensi daerah2 ekonomis penting • Maraknya penggunaan alat tangkap terlarang (WCW)
Narasumber	(Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi)
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi perikanan Tangkap : • Selat bali : 36.000 ton/th • Produksi tangkap : layang , lemuru, tongkol, cumi2 • Permasalahan : perijinan, alat tangkap yang digunakan, wilayah penangkapan berkurang, akibat gelombang tinggi banyak rumpon yang hilang dan nelayan banyak yang beralih pada BBL
Narasumber	(Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo)
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis ikan yang dominan : Kembung, Tembang, Kakap, Kerapu.

	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait rajungan; Supplier mencari bahan baku sampai Sumbawa. Baby crab menjadi produk dari wilayah Kab. Probolinggo. • Pengawasan untuk nelayan yang menangkap ikan tidak bisa dilakukan. Semestinya dilakukan kepada pengepul. Karena selama pengepul masih menerima pasokan ikan dibawah ukuran maka nelayan tidak akan menangkap ikan tersebut. • Alat tangkap : Jaring dan bubu • Pengelolaan Kawasan konservasi masih belum jelas sejak ditetapkan. Sehingga pelaksanaan kegiatan di area tersebut . Untuk pengawasan terhadap terjadinya konflik karena nelayan dari kabupaten lain menebarkan jaring di atas Kawasan karang sehingga merusak ekosistem terumbu karang
Narasumber	(Dinas Perikanan Kabupaten Sampang
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai data produksi tahun 2022. Potensi perikanan; teri, kakap, kembung. Teri, kuniran, kurisi, rajungan • Permasalahan : untuk komoditas rajungan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan berupa greges yang digunakan diluar jalur penangkapan dan mini trawl. Hal ini dikarenakan tuntutan pasar • Perlunya edukasi tentang kegiatan penangkapan yang mengedepankan kelestarian SDI. • Makin maraknya pemanfaatan Kawasan pesisir sebagai Kawasan wisata sehingga ke depan akan mengancam kelestarian ekosistem laut dan pesisir.
Narasumber	Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 128 pulau (data 2022), 9 kecamatan kepulauan • Produksi perikanan tangkap ; 489 ton • Jenis ikan : layang, kembung, kakap, kerapu, rajungan • Alat tangkap yang digunakan; bubu, cantrang penggaruk • Penurunan ukuran rajungan yang tertangkap. • Potensi di kepulauan (Raas, sapeken) rajungan masih besar akan tetapi tidak didukung oleh sarana transportasi yang memadai.
Narasumber	APRI (Pak Bagus) Program Perbaikan Perikanan Rajungan Indonesia
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Jatim sebagai salah satu lokasi sentra pengembangan dan implementasi program kegiatan APRI • Pengenalan APRI

	<ul style="list-style-type: none"> • Tentang Fisheries Improvement Program (FIP) • Program FIP pada Rajungan di Indonesia • Peran Pasar dalam mendukung pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan
Narasumber	Pak. Herman Upaya perbaikan Perikanan Pole and Line Handline oleh Private Sector AP2HI)
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Sekilas AP2HI • Latar Belakang dan kondisi program perbaikan perikanan • Rantai Pasok Pasar tuna • Kendala dan Tantangan • Harapan dan Tindak Lanjut Program Perbaikan Perikanan
Narasumber	Rizal Rifai - Direktorat PSDI
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen PSDI KKP untuk menyelenggarakan perikanan berkelanjutan salah satunya adalah dengan FIP. • FIP merupakan salah program strategis dari KKP yang nantinya akan memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat. • 2022-2025 kolaborasi KKP dan MSC. Dimana lokasi kegiatan MSC ada di Jatim (Surabaya, Banyuwangi, Lamongan, Pamekasan, Malang, Pasuruan), Maluku dan NTB. • Fokus Lemuru, Rajungan, Kakap, Kerapu, Teri, Kembung, Tongkol
Narasumber	Pak Arif (FKIP Univ. Brawijaya) Pertemuan Koordinasi Program Perbaikan Perikanan di Jawa Timur
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Pra Penilaian Perikanan Tongkol di Jawa Timur • Hasil penelitian yang dilakukan oleh FPIK UB..Teri, Kembung, Tongkol, rajungan, • Potensi SDI jawa Timur yang cukup besar dan perlu untuk dikelola secara professional yang mengedepankan pada keberlanjutan
Narasumber	Bapak Hariyadi (Unmuh Malang)
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala Sertifikasi MSC • MSC memiliki 3 prinsip, 28 variabel, 89 kriteria • Peran Perguruan Tinggi pada proses pengajuan sertifikasi MSC • Operasional MSC • Keuntungan sertifikasi MSC

Narasumber	Bu Nur PT. Sahabat Laut Lestari (Bali)
Substansi	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan software tracetale untuk UPI• 2 juta produk, 9 UPI yang menggunakan software tersebut• Penerapan program FIP dan fisheries certification implementation